

**PRODUKTIVITAS DPRD BANGKALAN DALAM PEMBENTUKAN
PERDA PERIODE 2019-2024 DITINJAU DARI AS-SIYĀSAH ASY-
SYAR'IYYAH**

SKRIPSI

Oleh
Zulfiatul Hananah
NIM. 05020420053



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Tata Negara
Surabaya
2023

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulfiatul Hananah

NIM : 05020420053

Fakultas/Prodi: Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara

Judul : Produktivitas DPRD Bangkalan dalam Pembentukan Perda

Periode 2019-2024 ditinjau dari Siyasah Syar'iyah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Surabaya, 27 November 2023

Saya yang menyatakan,



Zulfiatul Hananah

NIM. 05020420053

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Zulfiatul Hananah

NIM. : 05020420053

Judul : Produktivitas DPRD Bangkalan dalam Pembentukan Perda Periode
20192024 ditinjau dari Siyasah Syar'iyah

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 27 November 2023

Pembimbing,



Dr. Achmad Yasin, M.Ag

NIP. 196707271996031002

PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Zulfiatul Hananah

NIM. : 05020420053

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Majelis Munaqasah Skripsi:

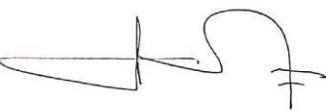
Penguji I



Dr. Achmad Yasin, M.Ag

NIP. 196707271996031002

Penguji II



Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, M.H.

NIP. 196803292000032001

Penguji III



Iksan Fatah Yasin, S.H.I., M.H.

NIP.198905172015031006

Penguji IV



Auliya Ghazna Nizami, Lc., M.H.

NIP. 202111005

Surabaya, 14 Desember 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. HULIKA INDRAHISALAH, M.Ag.

NIP. 196303271999032001

PERSETUJUAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Zulfiyatul Hananah.....
 NIM : 05020420053.....
 Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum.....
 E-mail address : 05020420053@student.uinsby.ac.id.....

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif atas karya ilmiah :
 Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
 yang berjudul :

Produktivitas DPRD Bangkalan Dalam Pembentukan Perda Periode 2019-2024 Ditinjau Dari

As-Siyāsah Asy-Syar'iyyah

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 05 Januari 2024

Penulis

(Zulfiyatul Hananah)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Salah satu fungsi dibentuknya DPRD yaitu untuk pembentukan Perda. Fungsi pembentukan Perda dilaksanakan dengan tiga cara: pertama, Menyusun Propemperda bersama Bupati, kedua Membahas bersama bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda, ketiga Mengajukan usul rancangan Perda. Dalam penelitian ini yang berjudul: Produktivitas DPRD Bangkalan dalam pembentukan Perda Periode 2019-2024 ditinjau dari *As-Siyāsah Asy-Syar'iyyah*. Riset ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah: Pertama, bagaimana produktivitas pembentukan Raperda Kab. Bangkalan yang digagas oleh DPRD Kabupaten Bangkalan dalam pembentukan Perda Periode 2019-2024; Kedua, bagaimana tinjauan *As-Siyāsah Asy-Syar'iyyah* terhadap produktivitas DPRD Kabupaten Bangkalan dalam pembentukan Perda Periode 2019-2024.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian empiris (field research). Penelitian ini juga bisa disebut dengan penelitian studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif, artinya peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun alasan dalam menggunakan metode kualitatif yaitu ingin menggambarkan kinerja Legislasi dalam produktivitas DPRD Bangkalan untuk pembentukan Perda periode 2019-2024 yang ditinjau dari *As-Siyāsah Asy-Syar'iyyah* secara utuh berdasarkan data dan fakta yang diperoleh yang kemudian dianalisis secara detail. Dan teknik analisis data menggunakan deskriptif induktif yang selanjutnya disusun secara sistematis

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: pertama, bahwa produktivitas DPRD Bangkalan dalam pembentukan Perda Periode 2019-2024 jika dilihat dari Propemperda DPRD Bangkalan Periode 2019-2024 belum maksimal. Sebab pada Periode 2019-2024 Perda yang dihasilkan setiap tahunnya menurun. Tapi dalam komunikasinya dengan Pemerintah Daerah, DPRD Bangkalan berkomunikasi dengan baik dengan Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Serta keduanya melaksanakan prinsip checks and balances dalam pembentukan suatu Peraturan Daerah. Kedua, jika ditinjau dari *As-Siyāsah Asy-Syar'iyyah* belum berjalan diatas prinsip kemaslahatan umat seperti yang tertuang pada konsep *As-Siyāsah Asy-Syar'iyyah*.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan pertama, Sebaiknya DPRD Kabupaten Bangkalan perlu meningkatkan Produk hukum/Perda guna membangun Kabupaten Bangkalan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengatur dan menata kehidupan masyarakat agar lebih tertib dan tentram. kedua, Sebaiknya Pemerintah Kabupaten Bangkalan perlu memperhatikan aspirasi masyarakat yang penting untuk dijadikan sebuah Perda. Sebagai perwujudan untuk mensejahterakan masyarakat dengan memperhatikan apa yang diperlukan oleh masyarakatnya.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
TRANSLITERASI.....	xiv
A. Konsonan	xiv
B. Vokal	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1) Latar Belakang	1
2) Identifikasi Dan Batasan Masalah.....	11
3) Rumusan Masalah	12
4) Tujuan Penelitian	13
5) Manfaat Penelitian	13
6) Penelitian Terdahulu	14
7) Definisi Operasional.....	17
8) Metode Penelitian.....	19
9) Sistematika Pembahasan	24
BAB II	26

DPRD DALAM PANDANGAN AS-SIYĀSAH ASY-SYAR'IYYAH DAN HUKUM POSITIF	26
A. DPRD Dalam Pandangan As-Siyāsah Asy-Syar'iyyah	26
1. Konsep Ahl al-Halli wa al-'Aqdi.....	26
2. Sejarah Ahl al-Halli wa al-'Aqdi.....	28
3. Kedudukan Ahl al-Halli wa al-'Aqdi	33
4. Tugas Dan Wewenang Ahl al-Halli wa al-'Aqdi.....	37
5. Teknik Pembentukan Qanun	43
B. DPRD Dalam Pandangan Hukum Positif	46
1. Dasar Hukum yang mengatur tentang DPRD	46
2. Fungsi, Tugas, dan wewenang DPRD	46
3. Teknik Pembentukan Perda.....	51
BAB III.....	56
PRODUKTIVITAS DPRD BANGKALAN DALAM PEMBENTUKAN PERDA PERIODE 2019-2024	56
A. Gambaran Umum DPRD Bangkalan	56
B. Visi dan Misi DPRD Bangkalan	60
C. Fungsi, Tugas Dan Wewenang DPRD Bangkalan Periode 2019-2024	61
D. Produktivitas DPRD Bangkalan Dalam Pembentukan Perda Periode 2019-2024	64
BAB IV	106
PRODUKTIVITAS DPRD BANGKALAN DALAM PEMBENTUKAN PERDA PERIODE 2019-2024 DITINJAU DARI AS-SIYĀSAH ASY-SYAR'IYYAH	106
A. Analisis Produktivitas DPRD Bangkalan dalam Pembentukan Perda Periode 2019-2024.....	106

B. Analisis Tinjauan As-Siyārah Asy-Syar'iyyah Terhadap Produktivitas DPRD Bangkalan dalam Pembentukan Perda Periode 2019-2024.	109
BAB V.....	117
PENUTUP.....	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA	120
LAMPIRAN-LAMPIRAN	125



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Nama Anggota DPRD Bangkalan Periode 2019-2024	58
Tabel 1. 2 Pimpinan DPRD Kab. Bangkalan.....	59
Tabel 1. 3 Dapil Pemilu 2019 Pemilihan DPRD Kab. Bangkalan.....	60
Tabel 1. 4 Raperda DPRD Kab. Bangkalan Thn 2019	68
Tabel 1. 5 Raperda Pemerintah Kab. Bangkalan Thn 2019	72
Tabel 1. 6 Raperda DPRD Kab. Bangkalan Thn 2020	76
Tabel 1. 7 Raperda Pemerintah Kab. Bangkalan Thn 2020.....	80
Tabel 1. 8 Raperda DPRD Kab. Bangkalan Thn 2021	84
Tabel 1. 9 Raperda Pemerintah Kab. Bangkalan Thn 2021	87
Tabel 1. 10 Raperda DPRD Kab. Bangkalan Thn 2022	92
Tabel 1. 11 Raperda Pemerintah Kab. Bangkalan Thn 2022.....	96
Tabel 1. 12 Raperda DPRD Kab. Bangkalan Thn 2023	100
Tabel 1. 13 Raperda Pemerintah Kab. Bangkalan Thn 2023	103

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Wawancara Bpk Yudi (Penyuluhan Hukum Ahli Muda Setda Kab. Bangkalan)	65
Gambar 1. 2 Wawancara Ibu Syarifah (Perancang Perundang-Undangan Ahli Muda Sekretariat DPRD Kab. Bangkalan)	104
Gambar 1. 3 Raperda & Perda DPRD Bangkalan Periode 2019-2024	105

DAFTAR PUSTAKA

- Bagian Hukum Setda Kabupaten Bangkalan. “Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Bangkalan.” Accessed November 7, 2023. <https://jdih.bangkalankab.go.id/site/perda>.
- Bawaslu Kabupaten Bangkalan. “50 DPRD Terpilih Kabupaten Bangkalan Resmi Dilantik,” August 24, 2019. <https://bangkalan.bawaslu.go.id/blog/2019/08/24/50-dprd-terpilih-kabupaten-bangkalan-resmi-dilantik/>.
- Benuf, Cornelius, and Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (June 2020).
- Chomzah, Siti. “Analisis Kinerja DPRD Di Era Otonomi Daerah (Studi Pada DPRD Provinsi Jawa Tengah.” Universitas Gajah Mada, 2002.
- DPRD Kabupaten Bangkalan. “Bapemperda Tetapkan Empat Perda, Rosi: Tahun Depan Kami Harus Bekerja Lebih Maksimal.” Accessed October 12, 2023. <https://dprd.bangkalankab.go.id/read/berita/dprd.bangkalankab.go.id>.
- . “Peraturan DPRD Bangkalan Nomor 34 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Bangkalan,” November 3, 2023.
- . “Pimpinan DPRD.” Accessed December 19, 2023. <https://dprd.bangkalankab.go.id/site/pimpinan>.
- . “Visi Dan Misi.” Accessed December 19, 2023. <https://dprd.bangkalankab.go.id/site/visimisi>.
- Dwiyanto, Agus. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada, 2002.
- Farid, Abdul Khaliq. Fikih Politik Islam. Jakarta: Sinar Grafika Group, 2005.
- Hamzah, La Ode Husen, and Askari Razak. “Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah: Studi di Kota Makassar.” *Journal of Lex Generalis (JLG)* 3 (August 2022): 2–3.

- Heriyanto, Doni. "DPRD Bangkalan Tetapkan Empat Perda Selama 2021," December 17, 2021. <https://timesIndonesia.co.id/peristiwa-daerah/387757/dprd-bangkalan-tetapkan-empat-perda-selama-2021>.
- Huda, Muhamad Nurul. "Kedudukan Dan Peran Al-Hall Wa al-'Aqd Relevansinya Pada Kinerja DPR." UIN Raden Intan, 2018.
- Ilmu Islam. "Hadits Bukhari Nomor 57 - Kumpulan Hadits." Accessed November 15, 2023. <https://ilmuislam.id/hadits/8781/hadits-bukhari-nomor-57>.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqih Siyasah : Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Ismatullah, Deddy, and Asep A. Sahid Gatara. Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum, Dan Agama. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007.
- Jafar, Hamdi. "Kinerja DPRD Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi (Studi Pada DPRD Kabupaten Kapuas Hulu)." Universitas Terbuka, 2015.
- Jamal, Khairunnas, and Ilyas Husti. "Etika Kekuasaan Menurut Al-Qur'an (Studi Terhadap Prinsip Musyawarah Dalam Tafsir Jami'ul Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an)." *Jurnal An-Nur* 4, no. 1 (2015).
- JDIIH BPK. "UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah." Accessed December 20, 2023. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>.
- Karenina, Anna. "Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2009-2019 Ditinjau Dari Fiqh Siyasah." Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2021.
- Kartiningrum, Eka Diah. "Panduan Penyusunan Studi Literatur." Stikes Majapahit, 2015. <https://stikesmajapahit.ac.id/lppm/wp-content/uploads/2019/04/panduan-penyusunan-studi-literatur.pdf>.
- Kementerian Agama RI. "Al-Qur'an Dan Terjemahnya." Jakarta, 2022.
- khalfaf, Abdul wahab. *Al Siyasah al Syar'iyyah fi al Syuun al Dusturiyah wa al Kharijiyyah wa al Maliyah*. Mesir, 1350.
- KPU RI. "Keputusan KPU Nomor 278/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 Tentang Penetapan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan

- Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Di Wilayah Provinsi Jawa Timur.” Accessed December 19, 2023.
https://jdih.kpu.go.id/data/data_kepkpu/278_Jatim.pdf.
- Mahanani, Anajeng Esri Edhi. “Urgensi Desentralisasi, Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Dalam Menjamin Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” *Res Publica* 1 (2017): 7.
- Manan, Abdul. Politik Hukum Studi Perbandingan Dalam Praktik Ketatanegaraan Islam Dan Sistem Hukum Barat. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Mandjoro, Alpin. “Analisis Kinerja Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Kabupaten Poso.” STIA LAN, 2018.
- Memontum. “Belum Ada Perda, Pembentukan Perda BPD Di Bangkalan Sampai Tahap Evaluasi Gubernur - Memontum,” August 22, 2019.
<https://memontum.com/belum-ada-perda-pembentukan-perda-BPD-di-bangkalan-sampai-tahap-evaluasi-gubernur>.
- . “Segera Wujudkan KLA, Komisi D Bahas Peyusunan Perda Perlindungan Anak,” February 26, 2020. <https://memontum.com/segera-wujudkan-kla-komisi-d-bahas-peyusunan-perda-perlindungan-anak>.
- Mudjib, H. Abdul. Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih. Jakarta: Kalam Mulia, 2005.
- Mustika, Sintya. “Ahlul Halli Wal Aqd Dalam Fiqh Siyasah Dan Perbandingannya Dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Di Indonesia.” IAIN Batusangkar, 2022.
- Najmawan, Ahmad Nur. “Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi.” Universitas Nasional, 2021.
- Nufiar. “Qanun: Tata Cara Pembuatan Qanun (Catatan Terhadap Praktek Pembuatan Qanun Aceh).” *Tahqiqa* 9, no. 1 (January 2015).
- Nurhayati, Agustina. Fiqh Siyasah. Bandar Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014.

- Nurhidayati, Siti. "Proses Pembentukan Peraturan Daerah (Bagian 1)." JDIH DPRD Bantul. Accessed December 20, 2023. https://jdih-dprd.bantulkab.go.id/ruanglegislati/download/210713115613naskah_publikasi.pdf.html.
- Onk, Kang. "UU Nomor 13 Tahun 2022 - Pembentukan Peraturan Perundangan Undangan." Cipta Desa, June 16, 2022. <https://ciptadesa.com/uu-13-tahun-2022/>.
- Peraturan.Go.Id. "PERDA No. 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan Qanun." Accessed December 20, 2023. <https://peraturan.go.id/id/perda-provinsi-nanggroe-aceh-darussalam-no-3-tahun-2007>.
- Pulungan, Suyuthi. Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- RI, Setjen DPR. "J.D.I.H. - Undang Undang Dasar 1945 - Dewan Perwakilan Rakyat." Accessed September 13, 2023. <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>.
- Riskiana, Ikki. "2 Macam-Macam Metode Pengolahan Data beserta Penjelasannya Lengkap." Blog Mamikos (blog), October 25, 2022. <https://mamikos.com/info/macam-macam-metode-pengolahan-data-pljr/>.
- "Sahih Al-Bukhari 6496 - To Make the Heart Tender (Ar-Riqaq) - كتاب الرقاق - Sunnah.Com - Sayings and Teachings of Prophet Muhammad (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)." Accessed September 13, 2023. <https://sunnah.com/bukhari:6496>.
- Salim, Abdul Mu'in. Fiqih Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Quran. PT. Raja Grafindo Persada, 1995.
- Setiawan, Bagus. "Kedudukan DPD RI dalam Sistem Negara Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah." UIN Raden Intan, 2017.
- Suparto. "Otonomi Daerah Di Indonesia ; Pengertian, Konsep, Tujuan, Prinsip dan Urgensinya." Universitas Islam Riau, 2017. <https://repository.uir.ac.id/841/1/%2819%29%20PROSIDING%20SEMNAS%20UMRAH%20%28OTDA%202017%29%20.pdf>.

- Suwardi, Dedy. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan APBD (Studi di Kabupaten Lampung Utara)." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Syamsuddin, Rahman. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: Kencana, 2019.
- Syarifah. Perancang Perundang-Undangan Ahli Muda di Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD Kabupaten Bangkalan. Interview, October 30, 2023.
- _____. Perancang Perundang-Undangan Ahli Muda Sekretariat DPRD Kabupaten Bangkalan. Interview, November 1, 2023.
- _____. Perancang Perundang-Undangan Ahli Muda Sekretariat DPRD Kabupaten Bangkalan. Interview, November 6, 2023.
- Syukur, Iskandar. "Implementasi Demokrasi Dalam Peranan Ahlu Al-Halli Wa al-'Aqdi." ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 11, no. 01 (2019).
- Taupiqqurrahman, and Ali Imran Nasution. "Fungsi DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Bungo." Supremasi Jurnal Hukum 3, no. 1 (February 22, 2021): 1–31. <https://doi.org/10.36441/supremasi.v3i1.121>.
- Tutik, Titik Triwulan, and Nunuk Nuswardani. Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Edisi pertama. Depok: Kencana, 2017.
- Wahyudianto, Akh. Penyuluhan Hukum Ahli Muda Setda Bangkalan. Interview, November 6, 2023.
- Yatim, Badri. Sejarah Peradaban Islam. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Zamachsari. "Raperda Dana Abadi Pesantren Di Bangkalan Tunggu Evaluasi Gubernur," July 13, 2023. <https://beritajatim.com/politik-pemerintahan/raperda-dana-abadi-pesantren-di-bangkalan-tunggu-evaluasi-gubernur/>.